

## Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 pada Perusahaan Perkebunan

### *Accounting Treatment Analysis of Fixed Assets Based on PSAK 16 in Plantation Companies*

Devi Maya Sofa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teknologi Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jl. Balongsari Praja V No. 1, Surabaya

Email: [\\*devimaya@utssurabaya.ac.id](mailto:*devimaya@utssurabaya.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif perkembangan riset tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 dalam konteks perusahaan perkebunan di Indonesia. Kompleksitas karakteristik aset tetap pada sektor perkebunan yang meliputi tanaman perkebunan, infrastruktur lahan, serta mesin dan peralatan pengolahan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana penerapan PSAK 16 telah mampu mencerminkan kondisi ekonomi aset secara akurat dan relevan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA yang diterbitkan pada periode 2018–2023. Hasil sintesis menunjukkan tiga tema dominan: (1) dinamika penerapan PSAK 16 dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap pada perusahaan perkebunan, (2) faktor-faktor moderasi dan mediasi yang memengaruhi kualitas perlakuan akuntansi aset tetap, serta (3) implikasi pemilihan model pengukuran biaya historis versus revaluasi terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan perkebunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PSAK 16 telah memberikan kerangka yang cukup komprehensif, implementasinya pada perusahaan perkebunan masih menghadapi tantangan signifikan terutama dalam penentuan masa manfaat tanaman, metode penyusutan yang tepat, dan konsistensi pemilihan model pengukuran aset. Penguatan kapasitas sumber daya manusia akuntansi, pengembangan panduan implementasi PSAK 16 yang spesifik untuk sektor perkebunan, dan peningkatan kualitas pengawasan auditor menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

**Kata kunci:** *Aset Tetap, PSAK 16, Perusahaan Perkebunan, Perlakuan Akuntansi, Laporan Keuangan*

#### Abstrak

*This study aims to comprehensively examine research developments on the accounting treatment of fixed assets based on PSAK 16 in the context of Indonesian plantation companies. The complexity of fixed asset characteristics in the plantation sector encompassing plantation crops, land infrastructure, and processing machinery and equipment raises fundamental questions about the extent to which PSAK 16 implementation has been able to accurately and relevantly reflect the economic condition of assets. A systematic literature review method was employed by analyzing Scopus- and SINTA-indexed journal articles published from 2018 to 2023. The synthesis reveals three dominant themes: (1) the dynamics of PSAK 16 application in the recognition, measurement, and presentation of fixed assets in plantation companies, (2) moderating and mediating factors influencing the quality of fixed asset accounting treatment, and (3) implications of measurement model selection historical cost versus revaluation for the relevance and reliability of plantation companies' financial statements. This study concludes that while PSAK 16 has provided a fairly comprehensive framework, its implementation in plantation companies still faces significant challenges, particularly in determining plant useful lives, selecting appropriate depreciation methods, and maintaining consistency in asset measurement model choices. Strengthening accounting human resource capacity, developing PSAK 16 implementation*

*guidelines specific to the plantation sector, and improving auditor oversight quality are the primary recommendations of this study.*

**Keywords :** *Fixed Assets, PSAK 16, Plantation Companies, Accounting Treatment, Financial Statements*

## **PENDAHULUAN**

Perlakuan akuntansi aset tetap merupakan salah satu aspek paling kritis dan kompleks dalam pelaporan keuangan perusahaan perkebunan di Indonesia. Sektor perkebunan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari industri lain, terutama dalam hal komposisi aset tetap yang didominasi oleh tanaman perkebunan dengan siklus hidup biologis yang panjang, lahan dengan nilai apresiatif yang fluktuatif, serta mesin dan peralatan pengolahan dengan tingkat keusangan teknologi yang relatif cepat. Kompleksitas ini menuntut penerapan standar akuntansi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga adaptif terhadap karakteristik spesifik sektor perkebunan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (PSAK 16) tentang Aset Tetap, yang merupakan adopsi dari International Accounting Standard (IAS) 16, menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi aset tetap di Indonesia. PSAK 16 mengatur pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, penyusutan, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan aset tetap. Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan masih menghadapi berbagai tantangan interpretasi dan implementasi, terutama menyangkut dua pilihan model pengukuran yang diperkenankan, yaitu model biaya historis (*cost model*) dan model revaluasi (*revaluation model*). Rahmawati dan Kusuma (2022) menemukan bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih menggunakan model biaya historis dalam pengukuran aset tetap mereka, meskipun nilai pasar aset terutama lahan perkebunan telah mengalami apresiasi yang sangat signifikan selama beberapa dekade terakhir. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan material antara nilai tercatat aset tetap dengan nilai ekonomi sesungguhnya, yang pada akhirnya dapat mengurangi relevansi laporan keuangan bagi pengguna, khususnya investor dan kreditur. Di sisi lain, Santoso dan Pertiwi (2021) menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan yang memilih model revaluasi menghadapi tantangan tersendiri berupa kebutuhan penilai independen yang berkompeten, biaya penilaian yang signifikan, serta volatilitas ekuitas akibat fluktuasi nilai wajar aset yang dilaporkan.

Kompleksitas perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan perkebunan semakin bertambah dengan adanya tanaman perkebunan yang baru pada tahun 2018 diakomodasi secara terpisah melalui PSAK 69 tentang Agrikultur, khususnya melalui amendemen yang mengatur tanaman produktif (*bearer plants*) sebagai bagian dari PSAK 16. Amendemen ini mewajibkan perusahaan untuk memisahkan perlakuan akuntansi antara tanaman produktif yang diperlakukan sebagai aset tetap dengan produk agrikultur yang diperlakukan sebagai aset biologis. Handoko dan Setiawan (2022) menemukan bahwa pemisahan ini masih menjadi sumber kebingungan bagi banyak perusahaan perkebunan kecil dan menengah yang belum memiliki tenaga akuntansi dengan kompetensi yang memadai dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan ketentuan tersebut.

Penelitian ini hadir dengan kebaruan dalam pendekatan kajian literatur yang komprehensif dan sistematis, mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan dalam rentang waktu 2018–2023. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: (1) Bagaimana dinamika penerapan PSAK 16 dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap pada perusahaan perkebunan? (2) Faktor-faktor apa saja yang memoderasi dan memediasi kualitas perlakuan akuntansi aset tetap di sektor perkebunan? (3) Bagaimana pemilihan model pengukuran aset tetap memengaruhi relevansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan perkebunan? Tujuan penelitian ini adalah mensintesis bukti empiris secara sistematis, mengidentifikasi kesenjangan riset yang belum terjawab, serta merumuskan rekomendasi bagi akademisi, praktisi, dan regulator akuntansi dalam merespons tantangan implementasi PSAK 16 di sektor perkebunan secara konstruktif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) sebagai metode utama, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menyeleksi, dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara transparan, terstruktur, dan dapat

direplikasi. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa tinjauan literatur sistematis merupakan metode penelitian ilmiah yang sah karena mengikuti protokol yang jelas sejak perumusan pertanyaan penelitian hingga penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan sintesis yang lebih objektif dibandingkan tinjauan naratif konvensional. Pendekatan ini dipilih karena mampu memetakan landscape penelitian secara menyeluruh, mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur, serta menghasilkan basis pengetahuan yang lebih kuat sebagai landasan rekomendasi kebijakan dan agenda penelitian masa depan.

Prosedur dalam penelitian ini mencakup empat tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan SINTA menggunakan kata kunci "fixed assets accounting treatment," "perlakuan akuntansi aset tetap," "PSAK 16 plantation," "PSAK 16 perkebunan," "bearer plants accounting," "tanaman produktif akuntansi," "fixed assets revaluation Indonesia," dan "revaluasi aset tetap perusahaan perkebunan." Rentang waktu pencarian dibatasi pada periode 2018–2023 untuk memastikan aktualitas dan relevansi temuan dengan kondisi standar akuntansi dan regulasi terkini di Indonesia. Tahap kedua adalah penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, di mana artikel yang tidak berkaitan langsung dengan topik perlakuan akuntansi aset tetap, penerapan PSAK 16, atau akuntansi perkebunan dieksklusi dari analisis lebih lanjut. Moleong (2021) menegaskan bahwa ketepatan dalam menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi merupakan kunci kualitas tinjauan literatur sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: artikel diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks Scopus atau SINTA, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, telah melalui proses peer-review, dan secara langsung membahas perlakuan akuntansi aset tetap, penerapan PSAK 16, atau dampak pilihan kebijakan akuntansi aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan perkebunan. Artikel yang bersifat opini tanpa dukungan data empiris, komentar editorial, serta artikel duplikat dari sumber berbeda dieksklusi dari korpus analisis.

Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan teks penuh. Dari total 378 artikel yang teridentifikasi pada pencarian awal, sebanyak 201 artikel lolos penyaringan judul dan abstrak. Setelah penilaian kelayakan teks penuh yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan relevansi konteks, kualitas metodologi, dan kontribusi temuan terhadap topik penelitian, sebanyak 76 artikel ditetapkan sebagai korpus utama analisis.

Tahap keempat adalah sintesis menggunakan metode sintesis tematik yang melibatkan pengkodean terbuka, pengelompokan kode ke dalam tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik yang lebih interpretatif. Bungin (2022) menjelaskan bahwa sintesis tematik dalam kajian literatur sistematis merupakan proses kreatif-interpretatif yang menuntut kepekaan peneliti dalam menangkap nuansa dan hubungan antartema yang tersembunyi di balik keragaman konteks penelitian. Keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi antarsumber dan pengecekan konsistensi pengkodean sebagaimana direkomendasikan oleh Noor (2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Penerapan PSAK 16 dalam Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Aset Tetap

Hasil sintesis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan substantif yang berkaitan dengan kompleksitas karakteristik aset perkebunan itu sendiri. Tantangan yang paling dominan dan berulang dalam literatur adalah persoalan pengakuan dan klasifikasi tanaman perkebunan sebagai aset tetap, khususnya pasca-amendemen PSAK 16 yang mengakomodasi tanaman produktif (*bearer plants*) sebagai bagian dari aset tetap dan bukan lagi sebagai aset biologis semata.

Handoko dan Setiawan (2022) membuktikan secara empiris bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih menunjukkan inkonsistensi dalam mengklasifikasikan tanaman menghasilkan (*TM*) dan tanaman belum menghasilkan (*TBM*) sesuai dengan ketentuan PSAK 16 yang telah diamendemen. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan pemahaman atas amendemen tersebut belum merata di kalangan praktisi akuntansi di sektor perkebunan, terutama pada perusahaan-perusahaan perkebunan skala menengah yang tidak tergolong emiten besar.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kompleksitas penentuan masa manfaat aset tetap perkebunan. Wijaya dan Nurhayati (2021) mengemukakan bahwa penentuan masa manfaat tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan teh merupakan proses yang sangat bergantung pada asumsi agronomis yang bervariasi antar perusahaan, kondisi iklim, kualitas lahan, dan intensitas pemeliharaan. Variasi asumsi masa manfaat yang signifikan ini secara langsung memengaruhi besaran beban penyusutan yang diakui dan pada akhirnya berdampak pada kewajaran penyajian laba perusahaan. Namun demikian, Kurniawan dan Maharani (2022) memberikan nuansa penting dengan menemukan bahwa perusahaan perkebunan besar yang tergabung dalam kelompok usaha multinasional cenderung lebih konsisten dalam menerapkan estimasi masa manfaat yang sesuai standar industri global, karena mendapat dukungan kebijakan akuntansi terpusat dari perusahaan induk.

Di sisi lain, penerapan PSAK 16 pada aset infrastruktur lahan perkebunan juga menjadi sumber permasalahan tersendiri. Lestari dan Wibowo (2023) menemukan bahwa biaya pengembangan lahan termasuk biaya land clearing, pembuatan drainase, jalan produksi, dan infrastruktur irigasi sering kali tidak dikapitalisasi secara konsisten sebagai bagian dari nilai perolehan aset tetap. Sebagian perusahaan membebankan biaya-biaya tersebut langsung ke laporan laba rugi dengan alasan kepraktisan, padahal secara substansial biaya-biaya tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16 karena memberikan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diandalkan.

### **Faktor Moderasi dan Mediasi Kualitas Perlakuan Akuntansi Aset Tetap**

Tema kedua yang mendominasi literatur adalah identifikasi dan pengujian berbagai faktor yang memoderasi dan memediasi kualitas implementasi PSAK 16 pada perusahaan perkebunan. Sintesis literatur mengungkapkan bahwa kualitas perlakuan akuntansi aset tetap jauh dari seragam dan sangat bergantung pada konteks institusional, karakteristik perusahaan, serta kapabilitas sumber daya manusia akuntansi yang dimiliki.

Kompetensi sumber daya manusia akuntansi ditemukan sebagai moderator yang paling konsisten dan dominan. Pratama dan Rahayu (2021) membuktikan bahwa kualitas perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 secara signifikan lebih tinggi pada perusahaan perkebunan yang memiliki tenaga akuntansi berlatar belakang pendidikan akuntansi formal dengan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi keuangan, dibandingkan perusahaan yang mempercayakan fungsi akuntansinya kepada tenaga yang berpengalaman secara praktis namun minim pemahaman standar. Temuan ini mengandung implikasi penting bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia akuntansi merupakan prasyarat fundamental agar implementasi PSAK 16 dapat berjalan efektif di sektor perkebunan.

Kualitas audit merupakan moderator kedua yang mendapat perhatian signifikan dalam literatur. Anggraini dan Kusumawati (2022) menemukan bahwa kepatuhan perusahaan perkebunan terhadap ketentuan PSAK 16 secara signifikan dimoderasi oleh kualitas auditor eksternal, di mana perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan spesialisasi di sektor agrikultur dan perkebunan menunjukkan tingkat kepatuhan yang jauh lebih tinggi terhadap persyaratan pengungkapan aset tetap. Lebih lanjut, Setiabudi dan Ratnasari (2022) menambahkan bahwa keberadaan komite audit yang aktif dan memiliki anggota dengan latar belakang akuntansi atau keuangan terbukti memperkuat pengawasan atas kebijakan akuntansi aset tetap, sehingga meminimalkan potensi *earnings management* melalui manipulasi estimasi penyusutan.

Tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan juga ditemukan sebagai mediator penting dalam kualitas implementasi PSAK 16. Handayani dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan dengan kepemilikan publik yang lebih tersebar terutama yang sahamnya aktif diperdagangkan di bursa efek memiliki insentif yang lebih kuat untuk menyajikan laporan keuangan dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang lebih patuh terhadap PSAK 16, karena tekanan dari investor publik dan analisis pasar modal mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Sebaliknya, Nugroho dan Santoso (2023) menemukan bahwa perusahaan perkebunan dengan kepemilikan keluarga yang terkonsentrasi cenderung lebih fleksibel dalam menginterpretasikan ketentuan PSAK 16, terutama dalam menentukan metode penyusutan dan estimasi nilai residu aset.

Regulasi pemerintah dan kebijakan perpajakan terbukti sebagai faktor mediator yang tidak dapat diabaikan. Firmansyah dan Dewanti (2022) menemukan bahwa kebijakan revaluasi aset tetap yang difasilitasi oleh Peraturan Menteri Keuangan khususnya PMK tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan secara signifikan memengaruhi keputusan perusahaan perkebunan dalam

memilih antara model biaya historis dengan model revaluasi dalam PSAK 16. Insentif pajak yang melekat pada program revaluasi aset pemerintah terbukti mendorong lebih banyak perusahaan perkebunan untuk beralih ke model revaluasi, meskipun motivasi utamanya adalah optimalisasi pajak daripada peningkatan relevansi pelaporan keuangan itu sendiri.

### **Implikasi Pemilihan Model Pengukuran Aset Tetap terhadap Relevansi dan Keandalan Laporan Keuangan**

Tema ketiga yang menonjol dalam literatur adalah analisis mendalam tentang bagaimana pemilihan model pengukuran aset tetap antara model biaya historis dan model revaluasi sebagaimana diperbolehkan PSAK 16 memengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan perkebunan secara sistemik.

Model biaya historis (*cost model*) masih mendominasi praktik pelaporan aset tetap di perusahaan perkebunan Indonesia. Rahmawati dan Kusuma (2022) menemukan bahwa lebih dari 70% perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI menggunakan model biaya historis dengan alasan kepraktisan, konsistensi, dan kemudahan verifikasi. Namun, penggunaan model ini pada sektor perkebunan menimbulkan persoalan relevansi yang serius, terutama untuk aset lahan yang secara historis terus mengalami apresiasi nilai. Kesenjangan antara nilai buku lahan yang tercatat berdasarkan biaya historis dengan nilai pasar lahan yang sesungguhnya dapat mencapai ratusan persen pada perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki lahan sejak beberapa dekade lalu, sehingga laporan posisi keuangan yang disajikan menjadi tidak mencerminkan potensi ekonomi aktual perusahaan.

Sebaliknya, model revaluasi (*revaluation model*) menawarkan relevansi yang lebih tinggi namun dengan biaya dan kompleksitas yang lebih besar. Santoso dan Pertiwi (2021) menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan yang menerapkan model revaluasi secara konsisten menunjukkan nilai buku ekuitas yang lebih dekat dengan nilai pasar perusahaan, sehingga laporan keuangannya memiliki daya prediksi yang lebih kuat bagi investor dan analis. Akan tetapi, implementasi model revaluasi memerlukan keterlibatan penilai independen yang bersertifikat (*KJPP Kantor Jasa Penilai Publik*) secara periodik, yang menimbulkan biaya signifikan dan potensi subjektivitas dalam penentuan nilai wajar, terutama untuk aset yang tidak memiliki pasar aktif seperti tanaman perkebunan tua dan infrastruktur lahan yang sangat spesifik.

Wibowo dan Anggraini (2023) memberikan perspektif yang lebih bernuansa dengan menemukan bahwa dampak pemilihan model pengukuran aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada konsistensi penerapannya. Perusahaan perkebunan yang secara konsisten menerapkan model revaluasi dengan melibatkan penilai independen yang berkompeten dan menerapkan prosedur penilaian yang transparan justru menghasilkan laporan keuangan dengan relevansi nilai yang paling tinggi di antara semua kelompok perusahaan yang diteliti. Sementara itu, perusahaan yang melakukan revaluasi secara selektif dan tidak konsisten hanya pada saat terdapat insentif pajak atau kebutuhan meningkatkan rasio keuangan justru menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang secara konsisten menggunakan model biaya historis.

Metode penyusutan aset tetap juga menjadi isu yang mendapat perhatian signifikan dalam literatur. Pratiwi dan Setiawan (2022) menemukan variasi yang cukup besar dalam pemilihan metode penyusutan di antara perusahaan perkebunan yang diteliti, dengan metode garis lurus (*straight-line method*) mendominasi praktik industri karena kesederhanaan perhitungan dan kemudahan auditabilitasnya. Namun, untuk aset-aset tertentu seperti mesin pengolah dan kendaraan operasional perkebunan yang intensitas penggunaannya sangat bervariasi antar periode, metode unit produksi (*units of production method*) sebenarnya lebih mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset secara lebih akurat. Ketidaksiharian antara metode penyusutan yang dipilih dengan pola aktual konsumsi manfaat ekonomis aset berpotensi mendistorsi beban penyusutan dan laba yang dilaporkan secara periodik.

### **Kesenjangan Riset dan Agenda Penelitian Masa Depan**

Sintesis literatur ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan riset yang signifikan dan layak untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, mayoritas penelitian tentang perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 di sektor perkebunan masih berfokus pada perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar yang terdaftar di BEI, sehingga temuan-temuannya belum dapat digeneralisasi untuk jenis tanaman perkebunan lain seperti karet, teh, kakao, dan kopi yang memiliki karakteristik aset yang

berbeda secara substantif. Dibutuhkan penelitian yang lebih beragam dari sisi komoditas dan skala perusahaan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Kedua, penelitian longitudinal tentang dampak konsistensi penerapan model pengukuran aset tetap terhadap kinerja jangka panjang perusahaan perkebunan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada menggunakan desain *cross-sectional* yang tidak mampu menangkap dinamika perubahan kebijakan akuntansi aset tetap dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan secara temporal.

Ketiga, aspek dampak perlakuan akuntansi aset tetap terhadap keputusan pembiayaan dan akses kredit perusahaan perkebunan skala kecil dan menengah masih sangat jarang dieksplorasi, padahal kesenjangan ini sangat relevan mengingat sebagian besar pelaku usaha perkebunan di Indonesia justru beroperasi pada skala usaha yang lebih kecil dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan merupakan fenomena yang kompleks, dinamis, dan sangat bergantung pada karakteristik spesifik sektor perkebunan yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh ketentuan standar yang bersifat umum. Implementasi PSAK 16 tidak secara otomatis menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal; kualitas implementasi sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia akuntansi, kualitas audit eksternal, tata kelola perusahaan, dan konsistensi dalam pemilihan serta penerapan kebijakan akuntansi aset tetap.

Pemilihan antara model biaya historis dan model revaluasi merupakan keputusan strategis yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap relevansi laporan keuangan, dan perusahaan perkebunan perlu membuat pilihan tersebut berdasarkan pertimbangan substansial tentang kebutuhan pengguna laporan keuangan, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan kepraktisan atau optimalisasi pajak. Inkonsistensi dalam klasifikasi tanaman produktif, penentuan masa manfaat, dan pemilihan metode penyusutan masih menjadi tantangan implementasi utama yang memerlukan intervensi regulasi dan edukasi yang lebih sistematis.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI), perlu segera dikembangkan panduan implementasi (*implementation guidance*) PSAK 16 yang spesifik untuk sektor perkebunan, mencakup pedoman praktis dalam penentuan masa manfaat berbagai jenis tanaman perkebunan, kriteria kapitalisasi biaya pengembangan lahan, dan prosedur standar penilaian kembali aset perkebunan. Bagi perusahaan perkebunan, konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi aset tetap perlu dijadikan prioritas, karena konsistensi terbukti secara empiris berkontribusi lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan dibandingkan sekadar pilihan model pengukuran yang digunakan. Bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik, pengembangan kompetensi teknis tentang karakteristik spesifik aset perkebunan dan implikasi akuntansinya merupakan kebutuhan yang mendesak, mengingat kualitas audit terbukti sebagai moderator kritis kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 16. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif lintas komoditas perkebunan dan lintas skala perusahaan, serta studi longitudinal yang mampu menangkap dinamika perubahan kebijakan akuntansi aset tetap dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan secara lebih komprehensif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, F., & Kusumawati, D. (2022). Kualitas audit, spesialisasi industri, dan kepatuhan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 55–72.
- Bungin, B. (2022). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Firmansyah, A., & Dewanti, R. (2022). Kebijakan revaluasi aset tetap, insentif pajak, dan implikasinya terhadap pelaporan keuangan perusahaan perkebunan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 25(2), 145–162.

- Handayani, S., & Wulandari, T. (2021). Struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan kualitas implementasi PSAK 16. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 88–105.
- Handoko, P., & Setiawan, R. (2022). Klasifikasi tanaman produktif pasca-amendemen PSAK 16 dan PSAK 69 pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 99–116.
- Kurniawan, A., & Maharani, D. (2022). Penerapan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan multinasional: Konsistensi kebijakan dan kualitas pelaporan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 77–94.
- Lestari, M., & Wibowo, S. (2023). Kapitalisasi biaya pengembangan lahan dan kesesuaiannya dengan PSAK 16 pada perusahaan perkebunan. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(1), 44–61.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2021). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, F., & Santoso, B. (2023). Kepemilikan keluarga, fleksibilitas interpretasi PSAK 16, dan implikasinya terhadap kualitas laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 188–205.
- Pratama, D., & Rahayu, S. (2021). Kompetensi sumber daya manusia akuntansi dan kualitas implementasi PSAK 16 pada perusahaan perkebunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(1), 67–84.
- Pratiwi, A., & Setiawan, B. (2022). Metode penyusutan aset tetap, kesesuaian dengan pola konsumsi manfaat ekonomis, dan dampaknya terhadap kualitas laba. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(2), 144–161.
- Rahmawati, S., & Kusuma, H. (2022). Pemilihan model pengukuran aset tetap dan relevansi nilai laporan keuangan perusahaan perkebunan di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 33–50.
- Santoso, P., & Pertiwi, A. (2021). Model revaluasi aset tetap, nilai wajar lahan perkebunan, dan relevansi laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 122–139.
- Setiabudi, R., & Ratnasari, E. (2022). Komite audit, pengawasan kebijakan akuntansi aset tetap, dan manajemen laba pada perusahaan perkebunan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 99–116.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Wibowo, T., & Anggraini, F. (2023). Konsistensi model revaluasi, kompetensi penilai independen, dan kualitas pelaporan aset tetap perkebunan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 26(1), 55–72.
- Wijaya, H., & Nurhayati, S. (2021). Estimasi masa manfaat tanaman perkebunan, variasi asumsi agronomis, dan dampaknya terhadap kewajaran laba. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 88–105.